

# MEMO HUKUM

*DWI SUDIARTANTI*

## KEDUDUKAN SAKSI PADA KEABSAHAN HIBAH DAN HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN

Telaah Yuridis

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 142 k/AG/1991



KK.  
Per 2198/96  
Sud  
h  
MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1996

# KEDUDUKAN SAKSI PADA KEABSAHAN HIBAH DAN HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN

Telaah Yuridis

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 142 k/AG/1991



KK.  
Per 2198/96  
Sud  
G

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

## MEMO HUKUM

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Pembimbing,

AFDOL, S.H., MS.  
NIP. 130517143

Penyusun,

DWI SUDIARTANTI  
NIM. 039213536

Pengadilan Agama diserahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Di negara Republik Indonesia Lembaga Baitul Mal ini belum terbentuk, sehingga dari segi kemaslahatan bisa saja seorang anak angkat menguasai seluruh harta peninggalan orang tua angkat. Layak atau tidaknya seorang anak angkat menguasai harta tersebut ditentukan oleh hakim berdasarkan penilaian terhadap anak angkat. Apabila anak angkat tersebut dinilai mampu untuk mengelola harta secara bijaksana atau apabila anak angkat itu memang benar-benar memerlukan harta tersebut untuk hidupnya, maka hakim bisa menyatakan bahwa dia layak.

Jadi dalam kasus ini Safiah sebagai anak angkat hanya berhak atas 1/3 harta peninggalan Nek Tuek sebagai hibah. Sedangkan 2/3 harta peninggalan Nek Tuek dengan Putusan Pengadilan Agama bisa diserahkan kepada Safiah untuk dikuasainya apabila Hakim menilai Safiah pantas/ layak untuk itu.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Keberadaan saksi pada perbuatan hukum hibah berfungsi sebagai alat bukti, di mana keabsahan akad hibah tidak digantungkan pada ada atau tidaknya saksi. Hal ini berbeda dengan akad nikah, di mana saksi berkedudukan se-

bagai salah satu rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad nikah. Dalam hal ada sengketa, kedudukan saksi sebagai alat bukti menjadi sangat menentukan dimana saksi yang kuat adalah alat bukti yang dalam kasus ini sangat menentukan, sehingga Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh dan Putusan Mahkamah Agung telah memenuhi kebenaran formil.

2. Penguasaan harta dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti, karena penyerahan harta yang dihibahkan pada perbuatan hibah menjadi unsur yang menentukan dalam hal adanya pengakuan hibah.

3. Dalam hal pewaris tidak mempunyai ahli waris tetapi hanya mempunyai anak angkat, maka  $\frac{1}{3}$  harta peninggalan diserahkan kepadanya dengan wasiat wajibah, sedang  $\frac{2}{3}$  harta peninggalan diserahkan kepada baitul mal. Apabila Baitul Mal belum terbentuk, seperti di Indonesia ini, maka hakim berhak menilai apakah anak angkat layak atau tidak untuk menguasai seluruh harta tersebut.

#### **Saran**

1. Kehadiran saksi sebaiknya selalu ada dalam setiap perbuatan hukum hibah, karena alat bukti sangat berperan dalam hal penyelesaian sengketa pengakuan hibah.

2. Pihak yang diberi hibah seharusnya segera menerima harta yang dihibahkan kepadanya untuk menjamin kepastian hibah tersebut.

3. Pewaris yang tidak mempunyai ahli waris se nasab, hendaknya memberikan wasiat wajibah kepada kerabat dekatnya, terutama kepada anak angkatnya, sebesar  $1/3$  hartanya.

4. Lembaga Baitul Mal seharusnya sudah dibentuk, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, agar pengelolaan harta peninggalan pewaris yang tidak mempunyai ahli waris terorganisasi dengan baik, sehingga dapat dipakai sebagai sarana untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat.